

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

**DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA SELATAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

PENGESAHAN

DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMSEL TAHUN 2025

Palembang, Januari 2025
Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Sumatera Selatan,



**DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI PENERAPAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) SUMATERA SELATAN**

NO	TARGET PRIORITAS
1	Pembentukan Tim Zona Integritas
2	Menyusun dokumen rencana kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
3	Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4	Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas
5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan BPSIP Sumatera Selatan, Tindak Lanjut Hasil Audit Internal serta Penerapan Standar Pelayanan Publik
6	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan SDM
7	Penyusunan, Penetapan dan Evaluasi SOP Kegiatan
8	Peningkatan disiplin dan Profesionalisme Pegawai
9	Menyusun Kegiatan dan Penganggaran Kegiatan yang Berorientasi pada pelayanan
10	Peningkatan akuntabilitas kinerja
11	Pelaksanaan pengawasan internal
12	Peningkatan kepatuhan pengelolaan keuangan negara melalui laporan keuangan
13	Menetapkan agen perubahan
14	Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
15	Pelaporan Kegiatan Tim ZI

Palembang, Januari 2025

Kepala Balai Penerapan Standar
Instrumen Pertanian Sumatera Selatan,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P*t*
NIP. 197106131998031002

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/ WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI
(WBBM)BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMSEL
TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut BPSIP Sumsel adalah unit pelaksana teknis di bidang penerapan standar instrumen pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP), Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BSIP, mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

B. DASAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM

D. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan Indikator :
 - a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan penilaian internal
 2. Pembentukan tim pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
 3. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas
- b. Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
 2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
 3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.
- c. Pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM mengacupada target yang direncanakan
 2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM
 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
- d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
1. Kepala Balai sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
 2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan Zona Integritas
 3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan zona Integritas menuju WBK/WBBM

Target:

1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan Aparatur Sipil Negara BPSIP Sumsel dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Aparatur Sipil Negara BPSIP Sumsel sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

II. Penataan Tatalaksana

Indikator :

- a. Prosedur operasional Tetap (SOP) kegiatan utama;
 1. Penyusunan SOP kegiatan utama yang mengacu kepada proses bisnis BPSIP Sumsel
 2. Penerapan SOP
 3. Evaluasi /Perbaikan SOP
- b. E-office/ e-goverment
 1. Penyusunan dan pemutakhiran sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (E- asset, E-UPBS, E-Personal, E-Monev dan i-monev)
 2. Penyusunan dan pemutahiran sistem kepegawaian (Simpeg, SAPK, SIM ASN)
 3. Penyusunan standar pelayanan publik (perpustakaan, laboratorium, UPBS, Kerjasama, Konsultasi, Taman Agrostandar)
- c. Keterbukaan informasi publik
 1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik
 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Target :

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen di zona integritas menuju WBK/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan kebutuhan organisasi
 1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja
 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya
- b. Pola Mutasi Internal
 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
 1. Penerapan penetapan kinerja individu
 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya
 3. Penetapan kinerja individu akan dilakukan secara periodik
- d. Penetapan Kinerja Individu
 1. Penerapan penetapan kinerja individu
 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator level di atasnya
 3. Penetapan kinerja individu akan dilakukan secara periodik
 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan
- e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
 1. Penerapan aturan/disiplin/kode etik/perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
 1. Pemuthakiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

Target:

1. Meningkatkan ketiaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada

masing-masing zona Integritas menuju WBK/WBBM

3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator :

- a. Keterlibatan Kepala Balai
 1. Kepala Balai terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
 2. Kepala Balai terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
 3. Kepala Balai memantau pencapaian kinerja secara berkala
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 1. Penyusunan dokumen perencanaan
 2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil
 3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
 4. Indikator Kinerja memiliki kriteria SMART
 5. Penyusunan laporan kinerja
 6. Peningkatan kapasitas SDM

Target:

1. Meningkatkan kinerja pada BPSIP Sumsel
2. Meningkatkan akuntabilitas

V. Penguatan Pengawasan

Indikator :

- a. Pengendalian gratifikasi
 1. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi
 2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian pada masing-masing kegiatan
 2. Melakukan kendali penilaian resiko pada masing-masing kegiatan
 3. Sosialisasi SPI ke semua personal
- c. Pengaduan Masyarakat
1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
 2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
 3. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
- d. Whistle blowing system
1. Menerapkan whistle blowing system
 2. Mengevaluasi penerapan whistle blowing system
 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan whistle blowing system
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama;
 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
 4. Mengevaluasi pelaksanaan benturan kepentingan
 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan

Target :

1. Meningkatkan kepatuhan pelaksana kegiatan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara
3. Mempertahankan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara
4. Menurunnya tingkat kerugian negara akibat temuan itjen atau BPK

VI. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Indikator:

- a. Standar Pelayanan
1. Penyusunan standar pelayanan publik

2. Penyusunan SOP bagi standar pelayanan
 3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
- b. Budaya Pelayanan Prima
1. Melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
 2. Memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media
 3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan serta pemberian kompensasi
- c. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
1. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
 2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
 3. Melakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat dan mudah dan tanpa biaya)
2. Mengusahakan unit pelayanan mempertahankan standarisasi pelayanan
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

